

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Husen, La Ode. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. *Pengusuran Skala Nasional: Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Konsorsium Pembaruan Agraria 2023*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nasution, Johan Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan: Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Suhaimi, Ahmad. *Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Kencana, 2020.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Perundang-undangan, dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID-Kemitraan, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT TMS.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 104.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 20220602-01-84722 tentang Pencabutan izin PT Andesit Lumbung Sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2831

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

C. Jurnal

Anis, et al. “Kebijakan Resentralisasi Pertambangan Dan Implikasinya Terhadap Tata
Kelola Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Lebak”. *Moderat: Jurnal Ilmiah
Pemerintahan* 11, no. 3 (2025).

Al Farisi, Muhammad Salman. *Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan
Pertambangan Mineral Dan Batubara. “Dharmasisya” Jurnal Program
Magister Hukum FH UI* 2, no. 38 (2023).

Azhar, Muhamad. *Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini
Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro. Administrative Law and Governance
Journal* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.90-102>.

Farhani, Athari, dan Ibnu Sina Chandranegara. *Penguasaan Negara terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Konstitusi* 16, no. 2
(November 2022). <https://doi.org/10.31078/jk1622>.

- Grahat, Ferdian, dan Gita. *Penilaian Risiko Korupsi Perizinan & Pengawasan Usaha Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2023.
- Hayati, Tri. *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Perusahaan Pertambangan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.
- Ishak, Nurfaidah, et al. *Eksistensi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 4, no. 1 (2020): 38-51.
- Kasenda, Victor, et al. *Kewenangan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (Juni 2023).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. *Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Res Republica* 1, no. 2 (November 2022). <https://doi.org/10.20961/respublica.v1i2.46732>.
- Putri, Rizkyana Z., dan Lita T. A. L. W. “Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Jurnal Law Reform* 11, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767>.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Faisal. *Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3>.

- Samuel. *Kewenangan Pelaksanaan Perizinan Investasi Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Dharmasiswa 1, no. 2 (2021): 1080-1090.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Susanto, Sri Nur Hari. *Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan*. Administrative Law & Governance Journal 2, no. 4 (November 2019).
- Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." Administrative Law & Governance Journal 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430>.
- Utami, Novita Eka. *Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara*. Jurnal Renaissance 8, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>.
- Pratama, Pebriansya, dan Pratama. *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1, no 2 (2024): 1-25.
- Zubaedah, Putri Amalia, dan Royyan Hafizi. *Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jurnal Cahaya Mandalika 3, no. 3 (November 2022). <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1432>.

D. Website

- Hukumonline. *3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya*. Hukumonline.com. Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/>.
- Hukumonline. *Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya*. Hukumonline.com. Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/?page=2/>.
- KPU. *Daya Berlaku Norma Hukum*. JDIHKPU. 20 November 2021. <https://jdih.kpu.go.id/jatim/banyuwangi/blog/read/5886/daya-berlaku-norma-hukum>.
- Salma. *Interpretasi Data: Pengertian, Jenis, Cara Melakukan, dan Contoh*. Deepublish. 9 Maret 2022. <https://penerbitdeepublish.com/interpretasi-data/>.
- Sulistya, Ananda Ridho. “5 Kasus Kerusakan Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan.” Tempo. 5 Juni 2025. <https://www.tempo.co/lingkungan/5-kasus-kerusakan-lingkungan-karena-aktivitas-pertambangan-1705467>.